HAMPIR DUA TAHUN AIR TAK MENGALIR, OMBUDSMAN RI DESAK EVALUASI PT TIRTA REMU

Selasa, 17 November 2026 - papbar

RRI.CO.ID, Sorong - Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat menyoroti serius persoalan pelayanan air bersih di Kota Sorong, khususnya di kawasan Perumnas, yang dilaporkan warga telah mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih selama hampir dua tahun.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Amus Atkana, mengatakan persoalan air bersih menjadi salah satu masalah pelayanan publik yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah, mengingat air merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman di Kota Sorong turut meningkatkan kebutuhan air bersih. Sementara itu, ketersediaan sumber air, baik air permukaan maupun air tanah, semakin terbatas.

"Persoalan air bersih di Kota Sorong menjadi masalah serius. Pertumbuhan kota semakin cepat, sementara ketersediaan sumber air bersih mulai menurun," ungkap Amus.

Ia mengungkapkan, masyarakat di kawasan Perumnas, khususnya wilayah gang baronang 2 dn baroang 4, mengeluhkan distribusi air dari PT Tirta Remu yang tidak berjalan normal selama hampir dua tahun.

Akibat kondisi tersebut, masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian penghasilan mereka untuk membeli air tangki. Situasi semakin memberatkan ketika musim kemarau panjang, karena harga air tangki mengalami kenaikan dan bervariasi, baik untuk ukuran kecil maupun besar.

Selain persoalan distribusi, masyarakat juga mempertanyakan proyek pemasangan jaringan pipa baru dan meteran air yang telah dilaksanakan di sejumlah gang dan lorong di kawasan Perumnas. Namun, hingga kini air belum mengalir sebagaimana yang diharapkan.

Bahkan, menurut laporan warga yang diterima Ombudsman, sejumlah meteran air yang telah dipasang dalam proyek tersebut dilaporkan hilang atau dicuri.

Atas kondisi itu, Ombudsman mendorong Pemerintah Kota Sorong melalui instansi teknis yang membidangi pekerjaan umum dan pengairan untuk memastikan jaringan distribusi air di wilayah Perumnas dapat berfungsi kembali.

Amus juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PT Tirta Remu. Menurutnya, Pemerintah kota Sorong sebagai pemegang saham perlu mengambil peran dalam mengevaluasi tata kelola perusahaan tersebut.

"Kami mendorong agar ada evaluasi manajemen PT Tirta Remu sehingga ada pembenahan dan keberlanjutan distribusi air kepada masyarakat Kota Sorong," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah dan perusahaan penyedia layanan air harus terbuka kepada masyarakat mengenai persoalan distribusi, termasuk kejelasan pembayaran dan kendala teknis yang menyebabkan air tidak mengalir.

Ombudsman berharap persoalan tersebut segera ditangani karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan air bersih yang layak sebagai bagian dari pelayanan dasar pemerintah.